

kuasa hukum memperlakukan hak dari kliennya terhadap kasus yang diberikan kepadanya.

3. Bagi para penegak hukum yang terlibat dalam kasus kepailitan seharusnya memberikan penyuluhan kepada para pihak yang hendak mengajukan proses kepailitan, hal ini dilakukan agar para pihak paham mengenai dampak-dampak yang akan ada selama proses kepailitan ini berlangsung, dan mencegah terjadinya penafsiran ganda mengenai hak dan kewajiban yang akan diterima dari proses kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal. 2000. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Fuady, Munir. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*. Jakarta : Citra Aditya.

Hartono, Siti Soemarti. 1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jogjakarta : Usaha Offset Printing.

Jono. *Hukum Kepailitan*. 2008. Jakarta : Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 1985. Yogyakarta : Liberty.

Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. 2008. Jakarta : Kencana Prenada Media.

Sjahdeni, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. 2010. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.

Soemitro, Ronny Hanintjo. *Metode Penelitian Hukum*. 1982. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Susilowati, Etty. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*. 2013. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

Simanjuntak, Partogi Natigor Hamonangan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. 2009. Jakarta : Djambatan

Dja'is, Mochammad. *Membaca dan Mengerti HIR edisi Revisi*. 2010. Semarang : Badan Penerbit UNDIP

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghali Indonesia, 2009.

Aria Suyudi, dkk, *Hukum Kepailitan Indonesia Kepailitan di Negara Pailit*, Jakarta: Pusat Studi hukum & Kebijakan Indonesia, 2004

Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.

Aria Suyudi, dkk, *Hukum Kepailitan Indonesia Kepailitan di Negara Pailit*, Jakarta: Pusat Studi hukum & Kebijakan Indonesia, 2004

Jurnal Ilmiah

Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 26-28 Januari 2004, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2005

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan

Putusan Nomor : 77/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst

Wawancara

Roy Napitupulu *lawfirm* William Cean

Sihol, Hakim Pengadilan Jakarta Utara